

PENGARUH PMA, PMDN DAN PAD TERHADAP ANGGARAN BELANJA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2002-2017

Adita Oktaria Pane¹, Faisyal Abdullah², Arfida Boedirochinarni³

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang,
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia
Corresponding author: aopane25@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 28 September
2020

Revised 17 October
2020

Accepted 28 October
2020

Available online 19
November 2020

Kata Kunci: *Investment;
Finance; Budget; Income.*

Abstrak

Investments in an area can improve existing economies, both foreign investment and domestic capital investment. With the increasing economy there will increase revenue in an area anyway, so that with increasing income in an area can affect the budget. In addition, it can be seen from the level of investment in an area. The purpose of this research is to know the development of investment in Bangka Belitung Islands Province and how to influence the budget in Bangka Belitung Islands Province. Data used in the form of secondary data can be downloaded through the official website of BPS and DPMPSTP (Investment office and integrated one Door service) with a period of 16 years using multiple linear regression analysis techniques with Using Test T, Test f and coefficient of determination. The results gained that foreign investment was not significant and negatively affected the budget, domestic capital investment was not significant but positively influential towards the budget and significant local revenue Positive impact on the budget.

JEL Classification
D25, E22

PENDAHULUAN

Dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi, dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan dalam produktivitas dan peningkatan pada pendapatan perkapita pada suatu daerah. Namun, permasalahan yang terjadi dalam pemerintah daerah sampai saat ini ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal.

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal (Todaro & Smith, 2006). Penanaman modal dalam suatu negara merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN).

Dengan adanya suatu rencana keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan adanya perancangan tersebut pemerintah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan berapa besar jumlah pengeluaran yang dibelanjakan.

Pada sisi pendapatan dapat membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan dengan melihat tingkat kemandirian suatu daerah, apabila semakin tinggi nilainya maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Selain penanaman modal dalam suatu negara, akumulasi modal juga dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu daerah, sehingga dapat terlihat peningkatan maupun penurunan dalam suatu anggaran belanja dalam suatu daerah.

Dengan adanya anggaran dapat diketahui kecenderungan suatu daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja yang berhubungan dengan upaya dalam meningkatkan perekonomian. Didalam APBD dapat dilihat bagaimana kondisi keuangan suatu pemerintahan daerah dalam anggaran sektor publik untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah.

**Tabel 1 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2017-2019**

No	Uraian	APBD 2017 (Rp Miliar)	APBD 2018 (Rp Miliar)	APBD 2019 (Rp Miliar)	% Perubahan (yoy)
I	PAD	737.19	789.62	817.00	3.47
	a. Pajak Daerah	578.23	669.99	711.67	6.22
	b. Retribusi Daerah	19.40	16.43	12.12	(26.23)
	c. Haasil Pengelolaan Daerah Yang Diperlukan	8.50	8.50	5.50	(35.29)
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	131.04	94.69	87.69	(7.39)
II	Dana Perimbangan	1,619.10	1,685.11	1,806.76	7.22
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	175.82	288.48	228.80	21.39
	b. Dana Alokasi Umum	987.55	1,018.67	1,806.76	2.77
	c. Dana Alokasi Khusus	455.71	477.95	505.61	5.79
III	Lain-Lain Pendapatan	30.00	12.31	86.10	599.43
	a. Hibah	-	-	86.10	
	b. Pendapatan Lainnya	30.00	12.31	-	(100.00)
	Total Pendapatan	2,386.29	2,487.06	2,709.87	8.96

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep Bangka Belitung, data diolah, 2019

Dapat dilihat bahwa pada tabel 1 Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp737.19 miliar dengan total pendapatan Rp2.386,29 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp789.62 miliar dengan total Pendapatan sebesar Rp2.487,06 miliar. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp817.00 miliar dengan total Pendapatan sebesar Rp2.709,97 miliar. Artinya, tingkat kemandirian keuangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan.

Tidak hanya Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan, namun Penanaman Modal Asing serta Penanaman Modal Dalam Negeri juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga akan meningkatkan pula Anggaran Belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah jumlah investasi dan investor Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sampai 2016.

**Tabel 2 Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Investasi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Investasi	34	43	41	100	74
2	Nilai Investasi (Triliun Rp)	1.066	1.707	1.739	2.056	1.156

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dalam jumlah investor sebanyak 100 dari tahun sebelumnya. Sehingga, nilai investasi yang didapat juga mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya sebesar 2.056 Triliun Rupiah. Masih kurangnya kerjasama dalam bidang penanaman modal serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi, sehingga diperlukan rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyajikan data terkini, peta potensi sumber daya dan peluang investasi dalam lingkup provinsi.

Berikut tabel anggaran belanja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga tahun belanja operasi selalu mengalami peningkatan.

Tabel 3 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019

No	Uraian	APBD 2017 (Rp Miliar)	APBD 2018 (Rp Miliar)	APBD 2019 (Rp Miliar)	% Perubahan (yoy)
1	Belanja Operasi	1,813.86	1,970.51	2,023.29	2.68
	a. Belanja Pegawai	820.17	748.03	799.71	6.91
	b. Belanja Barang	613.76	747.62	829.42	10.94
	c. Belanja Hibah	262.21	281.68	276.57	(1.81)
	d. Belanja Bansos	0.94	0.72	0.75	4.46
	e. Belanja Bantuan Keuangan	116.75	192.47	116.84	(39.30)
2	Belanja Modal	413.55	345.14	507.27	46.98
3	Belanja Tak Terduga	9.37	2.30	5.20	126.26
4	Transfer	362.19	277.93	386.27	38.98
Total Belanja		2,598.98	2,596.70	2,922.02	12.53

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, data diolah 2019

Pada tahun 2017 belanja operasi sebesar Rp1,813.86 miliar lalu mengalami peningkatan pada tahun berikutnya 2018 sebesar Rp1,970.52 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp2,023.29. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pengeluaran dari setiap tahun anggaran yang diajukan kepada pemerintah daerah.

Semakin meningkatnya anggaran belanja pada suatu daerah artinya daerah tersebut mengalami kemajuan, maka akan semakin meningkat pula biaya modal atau pengeluaran pada daerah tersebut. Semakin berkembangnya suatu daerah, akan semakin banyak investasi yang akan menanamkan modal pada daerah tersebut.

Penelitian oleh (Nuarisa, 2013) yang berjudul "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal" menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian oleh (Wati & Fajar, 2018) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung"

menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi berganda. Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.

Penelitian (Fitriana & Sudarti, 2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau” menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Eviews. Hasil dari penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan R-Square sebesar 0,87 atau 87% bahwa variabel dalam model penelitian dapat memprediksi pengalokasian belanja modal sedangkan 13% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Penelitian selanjutnya oleh (Hidayah & Setiyawati, 2014) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di propinsi Jawa Tengah” menggunakan analisis regresi linier berganda serta pengujian asumsi. Hasil penelitian ini didapat dari hipotesis yang diajukan, terdapat dua hipotesis yang signifikan dan satu tidak berdampak signifikan. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung. Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan.

Penelitian oleh (Handayani & Nuraina, 2012) yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun” menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis diolah dengan SPSS. Hasil regresi linier berganda dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Penelitian (Kusnandar & Siswantoro, 2012) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal” menggunakan metode cross section dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil regresi yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Belanja dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah.

Penelitian (Halim & Mada, 2001) “Anggaran Daerah dan “ Fiscal Stress ” (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi Di Indonesia)” menggunakan data sekunder dan sumber data didapat dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat I (provinsi) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil yang didapat bahwa setahun setelah fiscal stress yang terjadi di tahun 1997 secara rata-rata dari seluruh provinsi di Indonesia tidak (belum) menurunkan peran PAD terhadap total anggaran penerimaan/ pendapatan daerah provinsi. Dari dua komponen primadona PAD maka yang terpengaruh secara signifikan adalah proporsi (peran) hasil retribusi daerah. Untuk hasil pajak daerah proporsi (peran)-nya terhadap PAD relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yakni dalam tahun dengan periode 16 tahun yakni tahun 2002 sampai tahun 2017 serta dalam penggunaan variabel yang menggunakan tiga variabel independen yakni penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah serta satu variabel dependen yakni anggaran belanja.

Kesenjangan dan keterbaharuan penelitian sebelumnya dengan saat ini ialah menggunakan variabel yang berbeda dengan lama periode 16 periode serta menggunakan alat analisis berupa analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini berjudul Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja serta variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap anggaran belanja. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja serta mengetahui variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap anggaran belanja.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kepada para pembaca serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya memberikan manfaat bagi kepada masyarakat sekitar maupun kepada pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Serta pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan investor dan mengembangkan sektor-sektor yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang dapat menjadikan investor tertarik untuk berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan ialah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sampel menggunakan metode Nonprobability Sampling dengan jenis teknik sampling menggunakan sampling jenuh. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengembangkan dengan menggunakan metode-metode matematis, hipotesis yang kemudian diolah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sumber data menggunakan data sekunder yang dapat diunduh melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2002 sampai 2017, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu proses memperoleh data dengan mencatat, memfoto serta merekam data-data yang telah dipublikasi oleh lembaga atau instansi

yang terkait. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan periode 16 tahun yaitu antara 2002 - 2017. Teknik yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan software Microsoft Office Exel 2016 dan software statistic SPSS 20.0 untuk melihat hasil uji t, uji f serta uji koefisien determinansi. Metode analisis yang digunakan menggunakan model *time-series* dengan menggunakan kurun waktu selama 16 tahun yakni tahun 2002-2017 dan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Model Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ji} + \mu_i \rightarrow i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (1)$$

Atau

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \mu_i \rightarrow i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (2)$$

Dimana Y_i berupa ilai variabel dependen dari observasi ke-I, β_0 konstanta/ *Intercept*, β_j parameter/Koefisien regresi dari variabel ke-j (j=1,3,...,p), X_{ji} nilai variabel independen ke-j observasi ke-I, μ_i nilai gangguan/eror dari observasi ke-I, n banyaknya observasi dan p banyaknya variabel independen.

Uji yang dilakukan menggunakan Uji Statistik (F-test), Uji Statistik (T-test) dengan tingkat signifikan (α) 5% atau (α) = 0.05 dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Pada awalnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang. Namun, pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 pada tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Kabupaten bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Timur. Sehingga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°5' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan dan secara geografis Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Laut Natuna dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Sedangkan luas wilayah mencapai 81.725,23 km² dengan luas daratan seluas 16.424,23 km² atau 21,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Realisasi investasi yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung terus meningkat. Sektor unggulan yang ada di Bangka Belitung dan sebagian besar wilayah di Provinsi Bangka Belitung ialah pariwisata. Pariwisata dapat memberikan kontribusi yang cukup besar mengingat Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang memiliki banyak pantai dan pulau-pulau kecil sehingga menarik wisatawan asing untuk datang.

Masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sektor unggulan dalam investasi yang dapat dilihat berdasarkan potensi masing-masing tiap kabupaten maupun kota.

Untuk Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dimana fokus terhadap pembangunannya diarahkan kepada industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Selain itu pula, daerah tersebut memiliki sektor unggulan investasi di bidang pariwisata. Sedangkan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan serta Kabupaten Belitung lebih difokuskan ke arah sektor pertanian dan perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan serta perikanan laut.

Saat ini sektor yang menjadi minat investor untuk berinvestasi di Bangka Belitung terutama pada penanaman modal asing ialah industri makanan, tanaman pangan dan perkebunan, listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan telekomunikasi. Sedangkan minat investor untuk berinvestasi pada penanaman modal dalam negeri ialah terhadap sektor tanaman pangan dan perkebunan, listrik, gas dan air, hotel dan restoran serta industri makanan.

Berdasarkan data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi (BPPTPM) Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2012 kontribusi terbesar berasal dari sektor tersier dengan kontribusi sebesar 37,29% dan sektor primer dengan kontribusi sebesar 34,42%. Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,11%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,45%, sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan sebesar 2,78% dan sektor jasa-jasa sebesar 11,94%. Sedangkan sektor primer meliputi sektor pertanian sebesar 18,65% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,77%.

Untuk kontribusi terkecil ialah sektor sekunder sebesar 28,30% yang terdiri dari sektor pengolahan sebesar 19,23%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,71% dan sektor konstruksi sebesar 8,36%. Terdapat enam sektor yang berpotensi untuk digarap oleh investor yakni sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor pesisir kelautan dan perikanan, sektor pertambangan, sektor industri dan perdagangan, dan sektor pariwisata (Kepulauan, 2014).

Sumber investasi dari pemerintah pun juga tidak sebatas pemerintah dalam negeri, namun juga ada investasi yang berasal dari luar negeri. Masing-masing sumber investasi memiliki tujuan dan sasaran sendiri. Baik investasi dari masyarakat atau pemerintah, maupun dari dalam negeri dan luar negeri (Julfiansyah, 2013).

Tabel 4 Data Penanaman Modal Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2002-2017 (dalam juta rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Asing	Perubahan	
		Angka	%
2002	22.8546,23		
2003	288.546,23	0	0
2004	126.339,48	(102.206,75)	-45
2005	734.157,28	607.817,80	481
2006	8.763,97	(725.383,31)	-99
2007	8.763,97	0	0
2008	240.380,00	231.616,03	2643
2009	317.423,20	77.043,20	32
2010	310.576,61	(6.846,59)	-2
2011	2.065.144,17	1.754.567,56	565
2012	836.853,27	(1.228.290,90)	-59
2013	1.589.228,53	752.375,26	90
2014	1.485.322,16	(103.906,37)	-7
2015	1.168.859,06	(316.463,10)	-21
2016	745.698,35	(423.160,71)	-36
2017	2.164.913,18	1.419.214,83	190

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, data diolah, 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penanaman modal asing yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2002 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 dan 2003 mengalami hasil yang cukup baik sebesar 228.546,23 namun pada tahun berikutnya 2004 mengalami penurunan sebesar 126.339,48 atau sebesar -45%. Pada tahun 2005 kembali mengalami kenaikan sebesar 734.157,28 namun pada lima tahun berikutnya mengalami penurunan dan peningkatan. Hingga pada tahun 2011 jumlah penanaman modal asing sebesar 2.065.144,17 dan menurun sebesar -59% pada tahun 2012 atau sejumlah 836.853,27. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 90% dengan hasil penanaman modal sebesar 1.589.228,53 dan menurun pada tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar -7% pada tahun 2014 atau dengan hasil sebesar 1.485.322,16 tahun 2015 sebesar -21% atau sebesar 1.168.859,06 dan tahun 2016 sebesar 745.698,35 hingga mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 2.164.913,18.

Penanaman modal dalam negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jugm mengalami fluktuasi. Artinya investasi yang ada di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurang sehingga mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat pada tabel 1.5 bahwa pada tahun 2002 hingga tahun 2004

tidak mengalami perubahan sebesar 65.900,00 dan terjadi peningkatan pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 549.473,00.

Tabel 5 Data Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2002-2017 (dalam juta rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri	Perubahan	
		Angka	%
2002	65.900,00		
2003	65.900,00	0	0
2004	65.900,00	0	0
2005	549.473,00	483.573,00	734
2006	549.473,00	0	0
2007	313.725,90	(235.747,10)	-43
2008	200.000,00	(113.725,90)	-36
2009	249.342,90	49.342,90	25
2010	363.400,00	114.057,10	46
2011	514.397,10	150.997,10	42
2012	533.460,90	19.063,80	4
2013	608.204,40	74.743,50	14
2014	615.407,90	7.203,50	1
2015	1.023.739,00	408.331,10	66
2016	2.201.963,60	1.178.224,60	115
2017	1.734.732,50	(467.231,10)	-21

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, data diolah, 2019

Pada tahun 2007 penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan sebesar -43% dari tahun sebelumnya atau sebesar 313.725.90 dan kembali menurun pada tahun 2008 sebesar -36% atau sebesar 200.000,00. Pada tahun 2009 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan secara terus menerus, artinya penanaman modal dalam negeri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan, baik dari segi promosi dalam perusahaan maupun banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kepulauan Bangka Belitung.

Namun, pada tahun 2017 penanaman modal dalam negeri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 1.734.732,50 dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 2.201.963.60 dengan jumlah persen sebesar -21%.

Dari tabel 6 bahwa pendapatan asli daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan secara terus-menerus. Artinya, pendapatan asli daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2002 pendapatan asli daerah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 58.885,49 disusul tahun 2003 sebesar 71.780,12 dengan perkembangan sebesar 12895 dengan jumlah persen 22% dan kembali meningkat pada tahun 2004 dengan jumlah

sebesar 114.541,17 dengan jumlah perkembangan sebesar 42.761 dengan jumlah persen 60%. Pada tahun 2005 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 188.304,37 dengan tingkat perkembangan sebesar 73.763 dengan jumlah persen 64% dan disusul pada tahun 2006 dengan jumlah pendapatan asli daerah sebesar 198.173,31 dengan perkembangan sebesar 9.869 dan jumlah persen sebesar 5%.

Tabel 6 Data Pendapatan Asli daerah di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2002-2017 (dalam juta rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan	
		Angka	%
2002	58.885,49		
2003	71.780,12	12.895,63	22
2004	114.541,17	42.761,05	60
2005	188.304,37	73.763,20	734
2006	198.173,31	9.868,94	5
2007	206.573,77	8.400,46	4
2008	294.184,56	87.610,79	42
2009	246.799,84	(47.384,72)	-16
2010	328.122,02	81.322,18	33
2011	459.208,31	131.086,29	40
2012	438.515,46	(20.692,85)	-5
2013	495.796,07	57.280,61	13
2014	563.108,84	67.312,77	14
2015	590.915,46	27.806,62	5
2016	574.609,43	(16.306,03)	-3
2017	710.039,71	135.430,28	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Dalam Angka, data diolah, 2019

Kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2007 hingga tahun 2014, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Pada tahun 2007 sebesar 2.065,73 diikuti tahun 2008 sebesar 294.799,84 dengan jumlah persen sebesar 42%, tahun 2009 menurun sebesar sebesar -16% dengan jumlah 246.799,84. Pada tahun 2010 kembali meningkat sebesar 328.122,02 dengan jumlah persen sebesar 33% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 sebesar 590.915,46. Artinya, dalam jangka waktu 9 tahun pendapatan asli daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 574.609,43 Kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar 710.039,71. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya perubahan dalam meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah sehingga banyaknya perusahaan yang tertarik akan hasil dari produk dalam daerah tersebut.

Dari tabel 6 dibawah ini anggaran belanja yang ada di Provinsi Bangka Belitung bahwa anggaran belanja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung masih

kurang baik karena masih terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2002 saja anggaran belanja yang diperoleh sebesar 219.789,94 dan menurun pada tahun 2003 sebesar 83.950,41 dengan perkembangan sebesar -135840 dengan jumlah persen sebesar -62%. Pada tahun 2004 sebesar 84.819,11 dengan perkembangan sebesar 868.70 dengan jumlah persen sebesar 1%.

Tabel 7 Data Anggaran Belanja di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2002-2017 (dalam juta rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja	Perubahan	
		Angka	%
2002	219.789,94		
2003	83.950,41	(135.839,52)	-62
2004	84.819,11	868,70	1
2005	129.087,45	44.268,34	52
2006	119.316,46	(9.770,99)	-8
2007	844.732,97	725.416,50	608
2008	775.348,99	(69.383,98)	-8
2009	854.261,27	78.912,28	10
2010	862.715,77	8.454,50	1
2011	1.176.683,81	313.968,04	36
2012	1.332.117,86	155.434,05	13
2013	1.609.667,42	277.549,56	21
2014	1.596.086,85	(13.580,57)	-1
2015	1.869.958,48	272.088,73	17
2016	2.084.047,21	214.088,73	11
2017	2.359.064,20	275.016,99	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Dalam Angka, data diolah, 2019

Pada tahun 2005 meningkat sebesar 129.087,45 dengan jumlah perkembangan sebesar 44.268,34 dengan jumlah persen sebesar 52%. Pada tahun 2009 anggaran yang didapat sebesar 854.261,27 dengan tingkat persen sebesar 10% dan pada tahun 2010 sebesar 854.261,27 hingga meningkat sebesar 1.176.683,81 dengan tingkat persen sebesar 36% pada tahun 2011.

Diikuti dengan anggaran belanja 1.332.117,86 pada tahun 2012 dengan tingkat persen sebesar 13% serta tahun 2013 sebesar 1.609.667,42 dengan tingkat persen sebesar 21%. Sedangkan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar -1% sebesar 1.596.086,85. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 kembali mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut sebesar 1.869.958,48 pada tahun 2015, 2.084.047,21 pada tahun 2016 dan 2.359.064,20 pada tahun 2017 dengan tingkat perubahan sebesar 17% pada tahun 2015, 11% pada tahun 2016 dan 13% pada tahun 2017.

Oleh karena itu, perlunya perubahan dalam anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat memperbaiki perekonomian dan infrastruktur baik yang sudah ada untuk diperbaiki maupun yang belum ada untuk

segera dilaksanakan pembangunan agar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkembang seperti daerah lainnya.

Berdasarkan hasil uji yang dianalisis terdapat tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap anggaran belanja. Berdasarkan tabel uji t di atas Terdapat tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap anggaran belanja. Berdasarkan uji t di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel penanaman modal asing nilai signifikansinya sebesar 0.186 dimana lebih besar dari 0.05 dengan nilai t hitung sebesar -0.913.

Tabel 8 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-245461.204	117028.61		-2.097	0.058
X1	-0.124	0.136	-0.119	-0.913	0.186
X2	-0.94	0.153	0.074	0.617	0.149
X3	3.708	0.653	1.001	5.679	0.000

Sumber: Olahan Data Program SPSS 20, 2019

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ji} + \mu_i \rightarrow i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \mu_i \rightarrow i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_i = \beta_0 - \beta_1 PMA_i + \beta_2 PMDN_i + \beta_3 PAD_i$$

$$= -2.097 (C) - 0.913 (PMA) + 0.617 (PMDN) + 5.679 (PAD)$$

Berdasarkan tabel uji t di atas Terdapat tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap anggaran belanja. Berdasarkan uji t di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel penanaman modal asing nilai signifikansinya sebesar 0.186 dimana lebih besar dari 0.05 dengan nilai t hitung sebesar -0.913.

Sedangkan untuk variabel penanaman modal dalam negeri nilai signifikansinya sebesar 0.149 dimana lebih besar dari 0.05 dengan nilai t hitung sebesar 0.0617. Dan untuk variabel pendapatan asli daerah nilai signifikansinya sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari 0.05 dengan nilai t hitung sebesar 5.679.

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi anggaran belanja adalah variabel pendapatan asli daerah, sedangkan variabel penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak signifikan mempengaruhi anggaran belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan nilainya lebih besar dari 0.05, namun untuk penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif terhadap anggaran belanja. Berapapun besarnya inflasi, tidak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai PAD (Batik, 2013).

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi (Nuarisa, 2013). Uji f untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh tidaknya terhadap variabel dependen secara bersamaan.

Tabel 9 Uji f

Model	Change Statistics			
	R Square Change	df1	df2	Sig. F Change
1	0.979	3	12	0

Sumber: Olahan Data Program SPSS 20, 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara serentak variabel independen yang terdiri dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel dependen (anggaran belanja) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai f statistik sebesar 59.013.

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel teikat. Dengan koefisien ini, dapat diketahui apakah suatu model regresi telah diestimasikan bisa dikatakan baik atau tidak.

Tabel 10 Koefisien Determinasi

Model	df	F	Sig.
Regressio	3	59.013	0.000
Residual	12		
Total	15		

Sumber: Olahan Data Program SPSS 20, 2019

Dari hasil olahan data diatas dapat diketahui nilai determinasi R Square sebesar 0.937. Itu menunjukkan bahwa hubungan antara penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 94%. Hasil regresi tersebut dapat diartikan bahwa sebanyak 94% pengaruh anggaran belanja dijelaskan oleh variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah. Sedangkan 6% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

1) Pengaruh PMA, PMDN dan PAD terhadap Anggaran Belanja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil analisa regresi diatas, bahwa penanaman modal asing tidak signifikan terhadap anggaran belanja dan berpengaruh negatif. Hal itu disebabkan karena penanaman modal asing berdiri sendiri hanya saja melakukan usaha di dalam negeri sehingga modal yang dikeluarkan pun dari pihak asing dan akan dikembalikan pada investor. Hal itulah yang menyebabkan penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini juga diperkuat oleh teori (Sagita, 2013) yang mengatakan penanaman modal asing sebagai komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Artinya, penanaman modal asing yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja karena dipengaruhi oleh likuiditas serta harga saham serta terjadinya fluktuasi sehingga output yang didapat pun akan menurun.

Berdasarkan hasil analisa regresi diatas, bahwa penanaman modal dalam negeri tidak signifikan terhadap anggaran belanja namun berpengaruh positif. Artinya, penanaman modal dalam negeri dapat mempengaruhi besar kecilnya

anggaran belanja serta penanaman modal dalam negeri juga akan mendorong dalam berkembangnya perekonomian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini juga didukung oleh teori (Lin & Liu, 2000) yang mengatakan bahwa investasi aset memiliki efek positif terhadap pendapatan lokal serta pemerintah daerah juga dapat melakukan peningkatan daerah dengan menginvestasikan aset atau modal yang ada di perusahaan milik lokal. Dengan mempengaruhi secara tidak langsung penanaman modal dalam negeri terhadap anggaran belanja tetap dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga akan mempengaruhi pula anggaran pada suatu daerah. Dan juga tidak signifikannya penanaman modal dalam negeri terhadap anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun berpengaruh positif dibenarkan oleh teori (Shelton, 2007) yang menyatakan semakin besar komposisi aset yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan lokal atau transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Artinya, semakin besarnya investasi penanaman modal dalam negeri yang dilakukan maka akan semakin besar pula anggaran yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat terhadap suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisa regresi diatas, bahwa pendapatan asli daerah signifikan terhadap anggaran belanja dan berpengaruh positif. Artinya, pendapatan asli daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik sehingga mengalami perkembangan dan peningkatan sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja yang ada di daerah tersebut.

Dengan berpengaruhnya pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka hal tersebut sesuai dengan teori (Nuarisa, 2013), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah serta dalam pelaksanaan daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang merupakan unsur PAD yang utama (Elly, 2019).

Hal ini juga diperkuat oleh teori Doh dan Kim dalam (Suratno, 2018), yang menyatakan bahwa apabila pendapatan pada suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan anggaran belanja pada suatu daerah. Dengan menghasilkan PAD yang tinggi daerah dapat lebih memaksimalkan lagi untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan daerahnya untuk digali lagi (Nabilah, Soelistyo, & Kusuma, 2014).

2) Variabel Terbesar Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil analisa regresi secara parsial, pendapatan asli daerah memiliki potensi paling berpengaruh terhadap anggaran belanja. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan asli daerah di tiap tahunnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah secara terus menerus akan meningkatkan pula anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESIMPULAN

Secara uji parsial penanaman modal asing tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja, hal tersebut karena penanaman modal asing yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi serta penanaman modal asing yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam investasi langsung atau portofolio yang artinya dipengaruhi pula oleh likuiditas maupun harga saham yang ada. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak signifikan berpengaruh positif terhadap anggaran belanja, hal tersebut dipengaruhi karena investasi dalam negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan sehingga berpengaruh positif terhadap anggaran belanja. Pendapatan Asli Daerah signifikan berpengaruh positif terhadap anggaran belanja, hal tersebut dipengaruhi karena pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan secara terus menerus sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja yang ada serta potensi sumber daya alam yang meningkat akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Secara uji serentak penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara uji koefisien determinasi terdapat 94% pengaruh anggaran belanja yang dijelaskan oleh variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pendapatan asli daerah sedangkan 6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

Saran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal, baik investor asing maupun investor dalam negeri sendiri dengan lebih aktif lagi dalam mempromosikan aset-aset yang ada baik dari segi budaya maupun pariwisata.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan investasi dalam negeri yang nantinya akan meningkatkan anggaran belanja serta bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah di setiap kabupaten dan kota. Sehingga, dengan meningkatkan pendapatan daerah dapat meningkatkan pula pembangunan ekonomi. Serta pemerintah daerah dapat memilah mana yang harus dikeluarkan meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga anggaran yang dikeluarkan dan diterima akan tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 125. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735>
- Elly, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Fitriana, N., & Sudarti. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Ilmu Ekonomi*, 2(32), 332–345.
- Halim, A., & Mada, U. G. (2001). Anggaran DAAerah dan “ Fiscal Stress ” (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 16(4), 346–357.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.541>
- Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah. *Akuntansi*, XVIII(01), 45–58.
- Julfiansyah, D. (2013). Pengaruh Investasi Pma / Pmdn Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 227. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i2.3742>
- Kepulauan, B. B. P. (2014). BPPTPM (Provinsi) Kepulauan Bangka Belitung: Ada Potensi Bagus Menunggu Investor. Retrieved from <https://swa.co.id/swa/business-update/bpptpm-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-ada-potensi-bagus-menunggu-investor>
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *SNA XV Banjarmasin*, (32), 1–20.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Nabilah, A. N., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2014). Analisis Flypaper Effect PAD Dan DAU Terhadap Belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur 2010-2014. 14(2), 191–203.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aa.v2i1.1163>
- Sagita, R. (2013). *Economics Development Analysis Journal*. 2(4), 297–305.
- Shelton, C. A. (2007). The Size and Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics*, 91, 2230–2260. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.01.003>
- Suratno, A. P. S. (2018). Effect of government investment and capital participation on local own-Source revenue: The case of Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(4), 368–377.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>

Buku

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

